

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature review*) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.

2.1.1 Pertumbuhan Perekonomian

Menurut Rahardjo (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan volume produksi agar dapat tercapai Hal ini meningkatkan jumlah produksi dalam negeri. Mengukur pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau pada tingkat regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada evaluasi kuantitatif dari kemajuan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pembangunan ekonomi melampaui pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara pada suatu tahun, tidak hanya didasarkan pada peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu, tetapi juga memperhitungkan perubahan lainnya di berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, dan perbaikan infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2006).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad,1999).

Tujuan utama dalam mengembangkan ekonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan meningkatkan kesempatan kerja yang beragam dan jumlahnya bagi mereka. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah setempat perlu memprediksi potensi penuh dari sumber daya yang ada, serta bekerja sama dengan masyarakat untuk memulai langkah-langkah pembangunan daerah. Ini mengharuskan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat, menggunakan sumber daya yang ada untuk mengeksplorasi potensi yang diperlukan dalam merencanakan dan membangun ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2009). Dengan demikian aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang diukur dari besaran nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (Rill). PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di suatu wilayah dalam harga pasar (Suparmoko, 1994). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirumuskan :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

PDRB_t = PDRB tahun yang di hitung

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber

daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)

Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa

Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

2.1.4 Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan salah satu cabang perekonomian yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah bisnis dan ritel, termasuk reksa dana, bank, dan perusahaan asuransi. Kumpulan perusahaan atau lembaga keuangan dan lembaga pendukungnya sering disebut sebagai Industri Jasa Keuangan (FSI). Sektor keuangan sering disebut sebagai “darah perekonomian”. Pada saat yang sama, sektor jasa keuangan seringkali dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing global. Badan Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga atau perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Badan Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

Produk dari sektor keuangan dan asuransi meliputi:

1. Produk Perbankan: Produk perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan kartu kredit.
2. Produk Investasi: Produk investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan non-bank.
3. Asuransi: Produk asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan.
4. Layanan Jasa Keuangan: Layanan jasa keuangan seperti transfer uang, surat kredit berdokumen, dan jasa konsultasi keuangan.

2.1.5 Sistem Pembayaran

Committee for Payment and Settlement Systems/Bank for International Settlement (CPSS/BIS) sebagai pengelola sistem pembayaran internasional, memberikan defisi sistem pembayaran sebagai satuan hubungan antara instrumen atau prosedur yang bertujuan untuk memberikan kelancaran dalam perputaran dana. Sejalan dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23, memberikan penjelasan terkait pentingnya sistem pembayaran sebagai pelaksana pemindahan dana dari hasil aktivitas perekonomian di negara tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Purusitawati (2000), sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan hukum, standart, prosedur, dan mekanisme teknis oprasional pembayaran yang digunakan untuk pertukaran nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran. Seiring dengan kemajuan teknologi yang cepat, sistem pembayaran mengalami perkembangan.

1. Pembayaran Tunai

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran (Bank Indonesia). Peran

uang tunai sebagai metode pembayaran mulai tergeser dengan munculnya metode pembayaran non tunai. Dari penggunaan instrumen pembayaran berbasis kertas, perkembangan selanjutnya adalah munculnya instrumen pembayaran berbasis kartu seperti kartu kredit dan kartu debit/ATM.

2. Pembayaran Non Tunai

Metode pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai dan pertama kali dikenalkan dalam transaksi ritel pada tahun 1990-an. Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, melainkan sebagai pelengkap satu sama lain. Dalam sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based dan server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. *Non-cash* merupakan pembayaran tanpa uang tunai, Dalam kegiatan transaksi sehari-hari, masyarakat sering menggunakan pembayaran berbasis kartu karena lebih praktis dan efisien. Contoh dari pembayaran berbasis kartu meliputi penggunaan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) serta kartu prabayar.

2.1.6 APMK ATM/Debit

Alat pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) merupakan alat atau instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit menggunakan *Automated Teller Machine* (ATM). APMK menawarkan sarana kemudahan transaksi kepada masyarakat (Abidin, 2015). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 11/11/PBI/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi

APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), yaitu. alat pembayaran berupa kartu kredit, ATM dan/atau kartu debit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012, kartu debit merujuk pada APMK yang memungkinkan pembayaran atas transaksi pembelian barang atau jasa di mana ada kewajiban pembayaran yang ditanggung oleh pemegang kartu dari dana yang disimpan dalam simpanan atau tabungan pemegang kartu kepada bank atau lembaga yang berwenang. Kartu debit merupakan alat pembayaran di mana nasabah langsung mendebet rekeningnya saat menggunakan kartu tersebut. Sementara menurut Arief, kartu debit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan penggunaan saldo atau uang debit dalam kartu debit untuk berbelanja, kemudian mengurangi saldo rekening penjual sebesar total belanja yang dilakukan.

Seiring perkembangan waktu, jaringan infrastruktur ATM semakin meluas dalam penggunaannya. Bank-bank dengan teknologi yang lebih canggih mulai mengeksplorasi pengembangan kartu debit serta mendirikan perusahaan khusus yang menangani infrastruktur untuk transfer dana antar bank. Saat ini, banyak bank yang menawarkan kemampuan pembayaran di tempat-tempat belanja menggunakan kartu ATM yang telah diperluas fungsinya sebagai kartu debit.

Peningkatan signifikan dalam penggunaan kartu berbasis akun terjadi seiring bertambahnya jumlah bank yang menjadi penerbit kartu. Hal ini terjadi karena semakin banyak bank yang menyediakan infrastruktur *Electronic Data Capture* (EDC), yaitu mesin pembaca kartu debit di tempat-tempat belanja. Kemajuan ini

mendorong pertumbuhan yang paling pesat dari kartu berbasis akun dibandingkan dengan instrumen pembayaran lainnya.

2.1.7 APMK Kredit

Kartu kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang memungkinkan pelaksanaan pembayaran atas tanggung jawab yang timbul dari aktivitas ekonomi, termasuk transaksi pembelian serta/atau pengambilan uang tunai. Dalam kasus ini, kewajiban pembayaran oleh pemegang kartu pertama-tama ditanggung oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati, baik dengan melakukan pelunasan sekaligus (*charge card*) maupun dengan pembayaran secara bertahap (Departemen Komunikasi Bank Indonesia).

Pramono et al., (2006) menjelaskan bahwa kemudahan dalam berbelanja yang di akibatkan oleh banyak nya penggunaan kartu kredit yang dapat dilihat dari nilai transaksinya akan dapat meningkatkan perputaran uang pada sektor real makin meningkat. Hal tersebut juga menandakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat juga meningkat. Meningkatnya konsumsi tersebut akan mendorong produksi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Kondisi ini akan dapat mendorong output dan pertumbuhan ekonomi makin tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa makin meningkatnya transaksi non tunai dengan menggunakan kartu kredit dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (Susilawati & Putri, 2019).

2.1.8 Sistem BI-RTGS

Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai alat transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksi secara individu secara instan. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada 17 November 2000, Sistem BI-RTGS memiliki peran sentral dalam memproses transaksi pembayaran, terutama untuk transaksi besar yang bernilai Rp.100 juta ke atas dan memerlukan penyelesaian segera (*urgent*), yang termasuk dalam *High Value Payment System (HVPS)*.

Generasi II dari Sistem BI-RTGS diperkenalkan pada 16 November 2015 dengan salah satu fitur utama yaitu "*Liquidity Saving Management*" (LSM), yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi dalam pengelolaan likuiditas. Sebanyak 90% dari total transaksi pembayaran di Indonesia saat ini menggunakan transaksi HPVS, sehingga Sistem BI-RTGS dapat dianggap sebagai sistem pembayaran nasional yang memiliki peran yang sangat penting (*Systemically Important Payment System*).

Sistem BI-RTGS didesain untuk memastikan bahwa setiap transaksi diselesaikan secara *gross settlement, real-time, final*, dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian *real-time* terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada peserta penerima. Namun, waktu penyelesaian akhir dari transaksi transfer dana ke rekening nasabah tergantung pada kondisi dan standar sistem pemrosesan transaksi di internal peserta, sehingga perbedaan waktu penyelesaian akhir dapat terjadi antara Sistem BI-RTGS dan penerimaan transfer dana di rekening nasabah.

2.1.9 Teori Elastisitas

Elastisitas merupakan derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas digunakan untuk meramalkan hal yang akan terjadi jika harga barang/jasa dinaikan, dengan kata lain elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsi dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Berikut formulasi elastisitas:

$$1) \quad \beta_1 = \frac{\partial \text{Log} Y}{\partial \text{Log} X_1}$$

$$2) \quad \beta_2 = \frac{\partial \text{Log} Y}{\partial \text{Log} X_2}$$

$$3) \quad \beta_3 = \frac{\partial \text{Log} Y}{\partial \text{Log} X_3}$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Elastisitas variabel terikat (kinerja sektor keuangan) terhadap variabel bebas (transaksi kartu atm/debit, transaksi kartu kredit dan transaksi rtgs)
∂	= Presentase perubahan variabel
Log Y	= Variabel terikat (kinerja sektor keuangan)
Log X ₁ , Log X ₂ , Log X ₃	= Variabel bebas (transaksi kartu atm/debit, transaksi kartu kredit dan transaksi rtgs)

Elastisitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

A. Elastisitas permintaan

Elastisitas permintaan merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan.

Ada tiga konsep elastisitas permintaan yaitu:

1) Elastisitas permintaan harga

Elastisitas harga adalah perubahan tingkat permintaan konsumen atas suatu barang dibandingkan dengan perubahan tingkat harga barang.

2) Elastisitas permintaan silang

Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang yang lain. Pengukuran elastisitas silang antara dua jenis barang diperlukan untuk melihat tingkat hubungan antara keduanya, baik hubungan yang bersifat saling melengkapi (komplementer) atau hubungan saling mengganti (substitusi).

3) Elastisitas permintaan pendapatan.

Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan pendapatan.

Macam-macam elastisitas permintaan:

- a) Permintaan inelastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta < 1$.
- b) Permintaan elastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta > 1$.
- c) Permintaan unitary, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 1$.
- d) Permintaan inelastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 0$.

e) Permintaan elastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila

$$\beta = \infty$$

B. Elastisitas penawaran

Elastisitas penawaran merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran.

Macam-macam elastisitas permintaan:

- 1) Penawaran inelastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien < 1 .
- 2) Penawaran elastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien > 1 .
- 3) Permintaan unitary, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 1$.
- 4) Penawaran inelastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 0$.
- 5) Penawaran elastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= \infty$.

2.2 Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis, Judul dan Sumber	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fatatik Noer Diana, Widita Kurniasari ANALISIS PENGARUH INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Buletin Ekonomika Pembangunan Vol 2 No. 2 September 2021, hal 116-133	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Volume Transaksi Kartu Kredit X ₂ : Volume Transaksi SKNBI X ₃ : Volume Transaksi BIRTGS	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Volume Transaksi Kartu Kredit X ₃ : Volume Transaksi BIRTGS	X ₂ : Volume Transaksi SKNBI	Dalam jangka panjang kartu kredit dan SKNBI berpengaruh positif signifikan. Dalam jangka pendek kartu kredit tidak memiliki pengaruh. SKNBI dan BIRTGS dalam jangka pendek berpengaruh positif signifikan BIRTGS dalam jangka panjang tidak berpengaruh.
2.	Muliati, Arfiah Busari, Akhmad Noor Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Indonesia Inovasi Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen V 17 (3), 2021; 466-475	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) X ₂ : Jumlah Uang Beredar (M1)	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	X ₂ : Jumlah Uang Beredar (M1)	Dalam jangka pendek jumlah uang beredar dalam arti sempit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan pembayaran non tunai.
3.	Lina Nur Amalia ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VELOSITAS UANG DI INDONESIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, V 10 (3)	Y: Velolitas Uang Z: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Kredit X ₂ : Kartu Debit X ₃ : Uang Elektronik	Z: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Kredit X ₂ : Kartu Debit	Y: Velolitas Uang X ₃ : Uang Elektronik	Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan transaksi kartu kredit terhadap velositas uang.
4.	Mahesa Muhammad ANALISIS TRANSAKSI	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Debit	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Debit	X ₃ : E Money	Jumlah transaksi dari kartu debit dalam jangka

NO.	Penulis, Judul dan Sumber	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, V9 (2) 2020	X ₂ : Kartu Kredit X ₃ : E Money	X ₂ : Kartu Kredit		panjang dan jangka pendek serta uang elektronik/e-money dalam jangka panjang berpengaruh signifikan positif. Sementara, variabel kartu kredit dalam jangka panjang dan pendek dan uang elektronik/e-money tidak berpengaruh signifikan.
5.	Shintia Zulia Rahmi. Analisis Pengaruh Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2009-2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, V9 (2)	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : ATM/Debit X ₂ : Kartu Kredit X ₃ : Uang Elektronik	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : ATM/Debit X ₂ : Kartu Kredit	X ₃ : Uang Elektronik	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.
6.	Dewani Indah Tawakalni DAMPAK INOVASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, V9 (1)	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : ATM/Debit X ₂ : Kartu Kredit X ₃ : E-Money	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : ATM/Debit X ₂ : Kartu Kredit	X ₃ : E-Money	1. ATM/debit tidak berpengaruh dalam jangka panjang, namun dalam jangka pendek berpengaruh. 2. Kredit tidak berpengaruh dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek kredit berpengaruh negatif. 3. E-money berpengaruh negatif dalam jangka panjang dan jangka pendek
7.	Susilawati dan Dewi Zaini Putri ANALISIS PENGARUH	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Kredit X ₂ : E-Money	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu Kredit	X ₂ : E-Money X ₃ : Suku Bunga BI	Kartu kredit berpengaruh signifikan

NO.	Penulis, Judul dan Sumber	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TRANSAKSI NON TUNAI DAN SUKU BUNGA BI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 667-678	X ₃ : Suku Bunga BI			(2) e-money berpengaruh tidak signifikan (3) Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan. (4) kartu kredit, e-money dan suku bunga BI secara bersama-sama berpengaruh signifikan.
8.	As Sayyidah Az Zuhriyyah, Nurbetty Herlina Sitorus. Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebagai Isu Prioritas Indonesia Dalam G20 Journal on Education Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, pp. 8927-8937	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Nilai Transaksi Proprietary Chanel X ₂ : Nilai Transaksi APMK X ₃ : Nilai Transaksi RTGS X ₄ : Nilai Transaksi SKNBI	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Nilai Transaksi APMK X ₃ : Nilai Transaksi RTGS	X ₁ : Nilai Transaksi Proprietary Chanel X ₄ : Nilai Transaksi SKNBI	Nilai transaksi saluran kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nilai transaksi APMK mempunyai pengaruh positif tidak signifikan dalam jangka pendek dan berpengaruh positif signifikan dalam jangka panjang. Nilai transaksi RTGS mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan dalam jangka pendek, dan pengaruh negatif yang tidak signifikan dalam jangka panjang. Dan nilai transaksi SKNBI berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap indeks produksi.
9.	Hana Ayunda Purba, Isnaini Harahap, Atika Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran	Z: Inflasi Y: Pertumbuhan Ekonomi	Y: Pertumbuhan Ekonomi	Z: Inflasi	Secara langsung jumlah kartu ATM/Debit

NO.	Penulis, Judul dan Sumber	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif Ekonomi Islam JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 3 No. 2 April 2023 Page 752-766	X ₁ : volume transaksi kartu ATM/debit X ₂ : volume transaksi kartu Kredit	X ₁ : volume transaksi kartu ATM/debit X ₂ : volume transaksi kartu Kredit		transaksi (X ₁) dan jumlah transaksi kartu kredit (X ₂) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi (Y) dan inflasi (Z) Secara tidak langsung inflasi (Z) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi (Y) Secara tidak langsung inflasi (Z) tidak mampu memediasi hubungan pengaruh volume transaksi kartu ATM/debit (X ₁) dan kartu kredit volume transaksi (X ₂) terhadap pertumbuhan ekonomi.
10.	Merin Tri Lestari, Adi Irawan Setiyanto PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI, INFLASI DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 5, No. 2, 2021, {56-66}	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu ATM/Debit X ₂ : Uang Elektronik X ₃ : Inflasi X ₄ : Penerimaan Pajak	Y: Pertumbuhan Ekonomi X ₁ : Kartu ATM/Debit	X ₂ : Uang Elektronik X ₃ : Inflasi X ₄ : Penerimaan Pajak	Kartu ATM dan debit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Uang elektronik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan kartu ATM dan debit, uang elektronik, inflasi dan penerimaan

NO.	Penulis, Judul dan Sumber	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
11.	Ayu Nursari, I Wayan Suparta, Yoke Moelgini Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian JEP-Vol. 8, N0 3, Nopember 2019.	Y ₁ : Permintaan Uang (M1) Y ₂ : Pertumbuhan Perekonomian X ₁ : Kartu Debit X ₂ : Kartu Kredit X ₃ : E-Money X ₄ : Kriling X ₅ : RTGS	Y ₂ : Pertumbuhan Perekonomian X ₁ : Kartu Debit X ₂ : Kartu Kredit X ₅ : RTGS	Y ₁ : Permintaan Uang (M1) X ₃ : E-Money X ₄ : Kriling	Pembayaran non tunai (Kartu Debit/ATM, Kartu Kredit, E Money, Kliring, RTGS) berpengaruh positif terhadap perekonomian dan permintaan uang tunai di masyarakat Indonesia.
12.	Fariha Nawal Irbah. Dampak Digitalisasi Ekonomi Di Sektor Keuangan Terhadap PDB Jasa Keuangan Dan Asuransi Indonesia. Repository Universitas Jenderal Soedirman.	Y: PDB Jasa Keuangan dan Asuransi X ₁ : <i>m-banking</i> X ₂ : <i>fintech payment</i> X ₃ : <i>fintech lending</i> X ₄ : <i>i-banking</i>	Y: PDB Jasa Keuangan dan Asuransi	X ₁ : <i>m-banking</i> X ₂ : <i>fintech payment</i> X ₃ : <i>fintech lending</i> X ₄ : <i>i-banking</i>	<i>M-banking, fintech payment</i> dan <i>fintech lending</i> secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan. sedangkan variabel <i>i-banking</i> tidak berpengaruh signifikan.
13.	Husna Arifah, Moch. Fauzan Meidy H, Iis Surgawati , Nanang Rusliana , Fatimah Z. Nasution PERAN INDUSTRI JASA KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Mei 2023, V4(1), 60-67.	Y: Industri Jasa Keuangan X ₁ : Suku Bunga X ₂ : Inflasi X ₃ : Nilai Tukar	Y: Industri Jasa Keuangan	X ₁ : Suku Bunga X ₂ : Inflasi X ₃ : Nilai Tukar	Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan, Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri jasa keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (2011) menyatakan bahwa

kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara transaksi non tunai yaitu transaksi kartu ATM/debit, transaksi kartu kredit dan transaksi BI RTGS terhadap PDRB sektor keuangan sebagai salahsatu indikator pertumbuhan ekonomi.

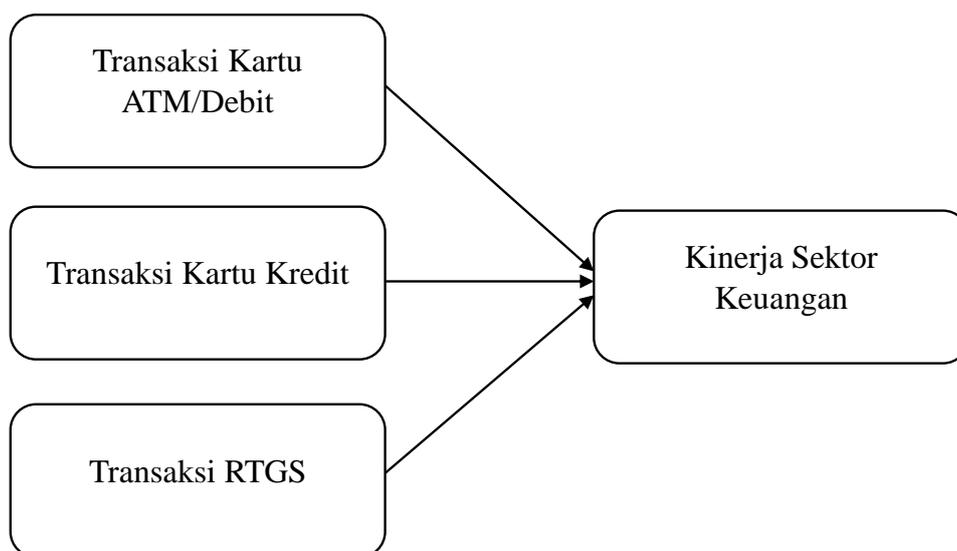
Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi yang pesat. Peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran digeser oleh bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis akibat adanya kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran (Pramono et al., 2006).

Dalam layanan jasa keuangan mencakup berbagai kegiatan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi. Beberapa contoh layanan jasa keuangan meliputi pembayaran, remitansi, penyaluran dana, kemitraan bank, asuransi, perantara keuangan, dan berbagai layanan pendukung lainnya. Lembaga keuangan, baik bank maupun perusahaan asuransi, menawarkan layanan ini untuk memudahkan transaksi keuangan, investasi, dan manajemen risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, layanan jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan.

Sistem pembayaran non-tunai dapat dianggap sebagai produk dari sektor keuangan karena merupakan bagian dari jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan berbagai alat

pembayaran, seperti kartu kredit, kartu debit, e-money, uang elektronik dan lain lain. Melalui jasa keuangan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai produk keuangan termasuk sistem pembayaran non-tunai yang mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, sistem pembayaran nn-tunai dapat dianggap sebagai salah satu produk dari sektor keuangan.

Secara garis besar berdasarkan uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah diajukan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial transaksi ATM/Debit, Transaksi Kredit dan Transaksi RTGS berpengaruh positif terhadap kinerja sektor keuangan di Pulau Jawa tahun 2019.1 - 2022.4.
2. Diduga secara bersama transaksi ATM/Debit, Transaksi Kredit dan Transaksi RTGS berpengaruh terhadap kinerja sektor keuangan di Pulau Jawa tahun 2019.1 - 2022.4.